

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Grup.
- Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amelia Cahyadini, Zainal Muttaqin, dan Anindya Saraswati Ardiwinata. 2023. *Hukum Pengawasan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Aminuddin Ilmar. 2022. *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Cet. II. Makassar: Phinata Media.
- Andrew Shandy Utama. 2021. *Problematisasi Penegakan Hukum*, Solok: Cv Insan Cendekia Mandiri.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintah Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azmi Fendri. 2021. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Diana Halim Koentjoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fajlurrahman Jurdi. 2021. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Revisi. Cet. II. Yogyakarta: Rangkang Education.
- H. Zainal Asikin dan Amiruddin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cet. IX. Jakarta: Rajawali Pers.
- HAW Widjaja. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada.
- Irwansyah. 2021. *Refleksi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- . 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Cet. V. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2019. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Cet. VI. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Maskun. *et al.* 2020. *Analisis Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar*. Gowa: Jariah Publishing Intermedia.
- Munir Fuadi. 2013. *Teori-Teori (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, *et.al.* 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustala Setia Bandung.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yunus Wahid. 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenada Media Group.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Aprima Damayana. 2023. *Penerapan Sanksi Administratif terhadap Penyelenggaraan Perizinan Bangunan Gedung yang Tidak Sesuai Dengan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kabupaten Way Kanan*.

Reza Dwi Syahputra. 2018. *Penegakan Hukum Bagi Bangunan Net City yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Yogyakarta*.

Jurnal

Agus Candra dan Surya Adinata. 2022. *Analisis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dengan Menggunakan Aplikasi SIMBG di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022*. Jurnal Perangkat Lunak. Volume 4 Nomor 3. Fakultas Teknik Silam Kuantan Singin. Teluk Kuantan.

Ahmad Mathar. 2023. *Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan*. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Volume 3. STAI An-Nadwah Kuala Tungkal. Jambi.

Anggaraeni Anglia Simbawa, Lendy Slar, dan Ollij Aneke Kereh. 2022. *Prosedur Perolehan Persetujuan Bangunan Gedung*. Lex Privatum. Volume 10 Nomor 4. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Ari Wulandari. 2023. *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Pasca Berlakunya PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja*. Jurnal Ekeltronik: Hukum Bisnis. Volume 7 Nomor 2. Magister Hukum Universitas Narotama. Surabaya.

Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 2024. *Kota Makassar dalam Angka 2024*.

Aprylia Putri Kusumawati. 2025. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perizinan Bangunan Gedung di Kota Semarang (Studi Kasus: Kecamatan Gunungpati)*. Undergraduate Law & Society Review. Volume 5 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Eka Merdekawati Djafar. 2014. *Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 3 Nomor 3. Mahkamah Agung. Jakarta.

Ghufran Syahputra Walla, Hendrik Salmon, dan Julista Mustamu. 2021. *Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1 Nomor 9. Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Ambon.

Juliadi Rusydi, Januri, dan Rika Santana. 2023. *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Jurnal Penelitian Hukum. Volume 2 Nomor 1. Univeritas Sang Bumi Ruwa Jurai. Lampung.

- Nasiratunnisaa Mallapiang, Rifdan, dan Hamsu Abdul Gani. 2023. *Akuntabilitas Proses Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa*. In Seminar Nasional Dies Natalis 62. Volume 1. Universitas Negeri Makassar.
- Nidia Suriani, Risnita, dan M. Syahrani Jailani. 2023. *Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan*. IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam. Volume 1 Nomor 2. Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran.
- Noviyanti, Rahmi Hidayanti, dan Yulianti. 2024. *Pencegahan Anak Terlibat Kejahatan Geng Motor: Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi di Polsek Jambi Selatan)*. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Volume 4. STAI An-Nadwah Kuala Tungkal. Jambi.
- Nur Alif, Maskun, dan Zulkifli Aspan. 2023. *Efektivitas Izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terhadap Budidaya Rumput Laut di Daerah Pesisir di Kabupaten Bantaeng*. Jurnal Tana Mana. Volume 4 Nomor 2. STAI Al-Furqan. Makassar.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. 2023. *Wewenang sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Sistem Negara Hukum*. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum. Pendidikan Dan Sosial Keagamaan. Volume 2 Nomor 2. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.
- Oktir Nebi. 2024. *Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi*. Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik. Volume 1 Nomor 3. Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia (APPIHI).
- Putri Dewi, Fery Chofadan Nessa, dan Fajriyana Farda. 2024. *Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Ruko Tanpa Izin Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bukittinggi*. Palar (Pakuan Law Review). Volume 10 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Bogor.
- Rahayu Subekti. 2022. *Pengawasan dan Penertiban terhadap Bangunan Gedung di Kota Padang Panjang*. Jurnal Komunitas Yustisia. Volume 5 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Roman Situngkir. 2021. *Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Volume 2 Nomor 3.
- T. Fahrul Gafar, et.al. 2022. *Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora. Volume 1 Nomor 3. Bajang Institue.
- Wicipito Setiadi. 2009. *Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 6 Nomor 4.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Penertiban Bangunan.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang.

Website

Dinas Penataan Ruang, 2024, *Profil Tugas dan Fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Makassar*. SIPETARUNG, Makassar. Diambil dari: <https://sipetaru.ngmakassar.id/profil/tupoksi> (diakses pada 05 April 2025 pukul 17.30).

Dinas Penataan Ruang, 2024. *Penyegelan Bangunan Rumah Tinggal*. SIPETARUNG, Makassar. Diambil dari: <https://www.sipetarungmakassar.id/berita/penyegelan-bangunan-rumah-tinggal> (diakses pada: 24 Januari 2025).

Menara Indonesia. 2024. *Sidak Bangunan Tanpa Izin, DPRD Makassar Desak Penegak Aturan*. Metro, Makassar. Diambil dari: <https://menaraindonesia.com/2025/01/14/sidak-bangunan-tanpa-izin-dprd-makassar-desak-penegakan-aturan/> (diakses pada: 6 Februari 2025).

Ronalyw. 2023. *Ratusan Bangunan Tak Kantongi IMB*. Berita Kota Makassar, Makassar. Diambil dari: <https://beritakotamakassar.com/berita/2023/12/20/ratusan-bangunan-tak-kantongi-imb/> (diakses pada: 10 Februari 2025).

Tim detikSulsel. 2024. *Kontroversi Bos Skincare Mira Hayati, Bangun Rumah Mewah Tapi Tak Izin*. detikSulsel, Makassar. Diambil dari: <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7607908/kontroversi-bos-skincare-mira-hayati-bangun-rumah-mewah-tapi-tak-izin> (diakses pada: 25 Januari 2025).